

PENDEKATAN KEWIRAUSAHAAN UNTUK PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI DAN PENUNJANG EKOWISATA DI BALI

I Made SARA

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Warmadewa, Indonesia

Korespondensi: I Made SARA

Email: madesara022@gmail.com

Informasi Artikel:

Dikirim: 2022-01-15

Direvisi: 2022-01-30

Diterima: 2022-02-20

Volume: 1

Number: 1

Hal: 1-9

Kata Kunci:

kewirausahaan,
ekowisata, lembaga
ekonomi, BUMDEs,
koperasi

Abstrak:

Pencapaian ekonomi mengubah banyak cara dalam menyikapi hidup dan memecahkan masalah sosial dan bisnis serta kesuksesan. Kemiskinan dan kesejahteraan merupakan masalah ekonomi yang dihadapi oleh semua daerah. Kemiskinan atau ketidaksetaraan yang dialami suatu daerah atau wilayah karena geografis (seperti iklim, lokasi, sumber daya alam), budaya (seperti nilai moral, norma perilaku sosial), pengetahuan dan kemampuan (seperti kualitas informasi, modal manusia). Dalam pengabdian masyarakat Fakultas Ekonomi Univesriatas Warmadewa ini mengedepankan tujuan mensosialisasikan BUMDEs serta pengelolaan potensi desa. Salah satu desa yang berpotensi untuk pengabdian masyarakat adalah Desa Galungan di Kabupaten Buleleng, Bali. Alasan pemilihan lokasi ini karena BUMDes Desa Galungan merupakan pengelola hutan desa sebagai objek ekowisata. Penelitian ini mengadopsi pendekatan tematik untuk menuju tujuan utama. Pengabdian masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Warmadewa mengedepankan tujuan mensosialisasikan BUMDEs serta pengelolaan potensi desa. Salah satu desa yang berpotensi untuk pengabdian masyarakat adalah Desa Galungan di Kabupaten Buleleng, Bali. Hasil pengabdian masyarakat adalah desa harus mampu mensinergikan BUMDEs dengan lembaga keuangan lainnya yang ada di desa seperti koperasi ataupun Lembaga Perkreditan Desa. Jika sinergitas ini terjadi, maka desa akan menjadi kuat dan pengelolaan potensi desa menjadi lebih optimal. Potensi hutan desa yang menjadi daya tarik wisata disini harus dikelola dengan baik melalui BUMDEs dengan mengedepankan strategi ekowisata. Ekowisata berdampak pada berbagai aspek, beberapa di antaranya adalah aspek konservasi, pemberdayaan, dan pendidikan lingkungan. Wisata dengan fokus konservasi alam juga mampu memberikan insentif ekonomi bagi upaya pelestarian dan keanekaragaman flora fauna yang ada. Tentunya juga akan berdampak pada budaya serta warisan alam di sekitar tempat wisata tersebut.



Cite This as: SARA, I. M. (2022). "Pendekatan Kewirausahaan Untuk Pengembangan Lembaga Ekonomi Dan Penunjang Ekowisata Di Bali." *Akuntansi dan Humaniora: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1 (1), Hal. 1-8.

PENDAHULUAN

Kemiskinan dan kesejahteraan merupakan masalah ekonomi yang dihadapi oleh semua daerah. Kemiskinan atau ketidaksetaraan yang dialami suatu daerah atau wilayah karena geografis (seperti iklim, lokasi, sumber daya alam), budaya (seperti nilai moral, norma perilaku sosial), pengetahuan dan kemampuan (seperti kualitas informasi, modal manusia). Kemiskinan lebih banyak didominasi penduduk pedesaan (Saputra dkk., 2019). Badan usaha milik desa (BUMDes) sebagai lembaga ekonomi usaha desa pengelola potensi desa merupakan bagian dari program pemerintah dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan desa. UU No. 6 tahun 2014 tentang desa memberikan kesempatan desa untuk membangun desa dengan memaksimalkan potensi, sumber daya manusia (Saputra dkk., 2018; Sara dkk., 2019). BUMDes

merupakan lembaga penguatan ekonomi desa dengan pengelolaan secara profesional, kooperatif dan mandiri (Saputra, Sara, et al., 2019).

Pencapaian ekonomi mengubah banyak cara dalam menyikapi hidup dan memecahkan masalah sosial dan bisnis serta kesuksesan. Landasan dalam literasi ekonomi menginspirasi pembelajaran dan kewirausahaan dalam upaya beradaptasi dengan pasar dinamis (Rahmat dkk., 2018). Dalam pandangan belajar saat ini, belajar dipandang sebagai proses aktif dalam menafsirkan dan membangun representasi pengetahuan individu (Scott-Clayton & Zafar, 2019). Belajar merupakan proses memahami perubahan lingkungan (Küçükali, 2010). Kemampuan memproses informasi secara aktif dan mengkonstruksi pengetahuan, pengalaman, mengintegrasikan pengetahuan dan pengalaman, memahami realitas sekitar dan beradaptasi dengan lingkungan eksternal merupakan proses pembelajaran (Narayan, 2020; Putri & Saputra, 2021; Saputra, 2019). Kompetensi dibutuhkan dalam persaingan bisnis saat ini. Kompetensi melalui pembelajaran kewirausahaan menjadi mesin menciptakan kekayaan (Kaihatu, 2006; Wahyudiati & Isroah, 2018). Literatur ekonomi mengakui, skema kebijakan pendidikan kewirausahaan melalui inovasi, pengelolaan kombinasi sumber daya efektif mendorong pembangunan berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi (Jaelani, 2016; Lin & Yi, 2011; Rasoolimanesh et al., 2020). Pendidikan dan pelatihan mendorong niat aplikasi kewirausahaan. Pelatihan kewirausahaan menciptakan keterampilan mengelola organisasi (Malesios et al., 2020; Verhees & Meulenberg, 2004).

Pariwisata sebagai kegiatan ekonomi menjadi alat keberlanjutan kualitas lingkungan dengan menggabungkan tiga pilar pembangunan berkelanjutan yaitu lingkungan, sosial budaya, dan ekonomi. BUMDEs di Bali dalam perkembangannya mengelola unit ekowisata hutan desa (Jayawarsa, Purnami, et al., 2021a; Sara et al., 2021). Pengelola BUMDes telah berupaya proaktif dan inovatif mencari cara baru yang berpeluang mengembangkan ekowisata berkelanjutan. Permasalahan secara umum yang dihadapi BUMDes adalah rendahnya niat wirausaha (Saputra, Sara, et al., 2019). Padahal, literatur ekonomi menegaskan pembelajaran dan aplikasi kewirausahaan mampu mengentaskan kemiskinan dan meraih kesejahteraan (Chung & Parker, 2008). Dalam pengabdian masyarakat Fakultas Ekonomi Univesriatas Warmadewa ini mengedepankan tujuan mensosialisasikan BUMDEs serta pengelolaan potensi desa. Salah satu desa yang berpotensi untuk pengabdian masyarakat adalah Desa Galungan di Kabupaten Buleleng, Bali.

METODE

Pengabdian masyarakat dilaksanakan di Desa Galungan, Kabupaten Buleleng, Bali. Alasan pemilihan lokasi ini karena BUMDes Desa Galungan merupakan pengelola hutan desa sebagai objek ekowisata. Penelitian ini mengadopsi pendekatan tematik untuk menuju tujuan utama. Tahap pertama dilakukan pendalaman situasi dilapangan dengan metode wawancara terstruktur dengan berbagai kelompok pemangku kepentingan untuk mengembangkan pemahaman lebih mendalam terkait persepsi informan tentang pembelajaran, pelatihan, dan bagaimana realitas kontekstual yang menginformasikan tentang pembelajaran kewirausahaan (Larasdiputra & Saputra, 2021). Teknik ini memberikan waktu dan kesempatan yang cukup bagi informan atau narasumber untuk menguraikan wawasan yang menarik (Sulaeman et al., 2017). Tahap kedua, melakukan analisis kebutuhan dilokasi pengabdian masyarakat, supaya narasumber dan pihak akademisi Universitas warmadewa mampu memberikan manfaat bagi masyarakat setempat (Larasdiputra & Suwitari, 2020). Tahap ketiga, penyiapan materi pengabdian dengan menyesuaikan antara teoritis, kondisi riil di masyarakat, dan persepsi pemangku kepentingan serta pemerintah (Ekayani et al., 2020). Dan tahap keempat adalah melakukan pengabdian masyarakat dalam bentuk sosialisasi pemberian materi dan pelatihan bagi pengurus BUMDEs Desa Galungan serta melakukan analisis potensi desa dan peluang-peluang usaha yang strategis dikembangkan di desa tersebut. Peserta pengabdian masyarakat ini meliputi kelompok utama terdiri atas pengelola dan karyawan BUMDes, pengelola UKM, kepala desa, desa adat, dan pemangku kepentingan terkait objek ekowisata-hutan desa, mahasiswa serta masyarakat yang umum yang berkepentingan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ekonomi pedesaan memiliki kemiripan prinsip dan nilai dengan ekonomi kerakyatan telah menjadi pembicaraan yang cukup lama, baik di kalangan organisasi masyarakat sipil, para ekonom progresif dan juga di sebagian internal pemerintahan sendiri (Sara et al., 2019). Banyaknya pembicaraan tentang ekonomi kerakyatan ini sebagian besar berhenti pada dokumen konsep yang belum pernah terealisasi dalam praktik secara komprehensif. Apalagi dalam sebuah gerakan yang massif. Pelembagaan usaha ekonomi masyarakat di pedesaan dipandang penting dalam perspektif bangunan kedaulatan ekonomi masyarakat desa, salah satunya untuk memperkuat daya saing dan daya tawar objek ekonomi masyarakatnya (Mulawarman, 2013; Saputra dkk., 2019; Sidarta, 2002).

Pelembagaan ini juga menjadi kebutuhan riil di lapangan, ditengah penguasaan sumber-sumber ekonomi masyarakat oleh korporasi hingga ke wilayah pedesaan. Tingkat ketergantungan yang besar ini, tentu akan menggerus aspek kedaulatan rakyat yang menjadi tujuan utamanya (Saputra dkk., 2019; Saputra, Atmadja, et al., 2019; Saputra, Sara, et al., 2019; Saputra & Tama, 2017). Jika mengacu pada prinsip, nilai dan peluang untuk pengembangan ekonomi di pedesaan secara terlembaga, maka ada 2 (dua) pilihan bentuk strategis yang dapat dikembangkan oleh masyarakat pedesaan, yakni: BUMDEs (Badan Usaha Milik Desa) yang dasar pembentukannya sudah cukup lengkap mulai dari undang-undang, peraturan pelaksanaannya, hingga kebijakan teknis operasional seperti dengan lahirnya UU 6 tahun 2014 tentang desa, UU 32 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, PP 43 tahun 2014 dan lain-lain. Koperasi yang secara institusional merupakan badan hukum usaha yang diakui bukan hanya oleh Negara, tapi juga oleh dunia, dimana koperasi juga telah memiliki organisasi internasionalnya yakni ICA (International Cooperative Alliance) (Pakiding & Randa, 2012). Kedua bentuk kelembagaan usaha ini memiliki kecocokan untuk diterapkan di wilayah pedesaan dengan alasan: a). Memiliki landasan konstitusional dan hukum yang jelas dan tegas; b). Termaktub dengan jelas dalam kebijakan pemerintah baik di tingkat nasional, daerah hingga ke pemerintahan desa. Posisi ini memungkinkan pemerintah dapat memperkuat posisi kedua bentuk lembaga usaha tersebut melalui program-programnya baik jangka pendek-menengah serta jangka panjang, dan c). Kedua bentuk kelembagaan tersebut mensyaratkan dengan tegas keterlibatan warga sebagai pelaku aktif di dalamnya (Saputra, Atmadja, et al., 2019; Saputra & Tama, 2017; Sara et al., 2020).

Dalam pelaksanaannya di lapangan, terkadang kita jumpai perbedaan pandangan dalam melihat posisi BUMDEs dan Koperasi serta strategi implementasinya. Perbedaan tersebut bisa jadi karena dipengaruhi oleh beberapa factor, diantaranya: 1). Pemahaman atas kedua bentuk kelembagaan oleh masing-masing orang dan komunitas yang juga tidak seragam; 2). Adanya kelebihan dan kekurangan dari kedua bentuk kelembagaan tersebut yang mempengaruhi kecenderungan orang dan/atau komunitas dalam menentukan pilihan; 3). Situasi kontekstual di wilayah masing-masing yang disebabkan oleh adanya dinamika politik di desa, adanya pengalaman penyimpangan praktik serta kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat (Hendrojogi, 2010; Saputra, Sara, et al., 2019; Sara et al., 2020).

Pemberdayaan Masyarakat untuk Mendukung Desa Berbasis Ekowisata

Multiplier effect pariwisata dapat dan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Namun demikian, membangun pariwisata mengharuskan banyak aktivitas yang dapat membawa dampak negatif bagi lingkungan (Pranita, 2016; Widyowati dkk., 2018). Untuk mensinergikan kegiatan ekowisata, program harus bisa mendukung kelestarian lingkungan hidup dan mendatangkan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Pengembangan ekowisata suatu desa atau kawasan perlu juga diarahkan untuk pengembangan inklusif bisnis, sehingga sektor wisata yang sebagai pemicu pengembangan suatu desa dapat berkelanjutan dan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa dengan mengangkat produk unggulan desa

(Jayawarsa, Purnami, et al., 2021a). *Ecotourism* menjadi ajang *entrepreneurship* bagi masyarakat setempat karena peluang banyaknya industri kreatif atau profesi untuk meningkatkan penghasilan secara ekonomi. Pernyataan yang mendukung konsep ini adalah:

"Kami bermaksud mengembangkan penciptaan wirausaha berbasis *ecotourism* guna mendukung rasio kewirausahaan yang pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 3,95% atau membutuhkan 1,5 juta wirausaha inovatif," (Pernyataan Perwakilan Lembaga Koperasi dan UMKM Bali).

Dalam konteks pengembangan kewirausahaan dalam pembangunan desa berbasis ekowisata, dapat dianalisis bahwa lebih banyak keterlibatan masyarakat lokal (Jayawarsa, Purnami, et al., 2021a, 2021b). Sehingga dalam konsep ini lebih mengedepankan wirausaha berbasis masyarakat lokal dan memiliki nilai jual yang tinggi. Pemberdayaan masyarakat menjadi pilihan bagi desa untuk mengembangkan desa berbasis ekowisata (Jayawarsa, Saputra, et al., 2021; Sara & Saputra, 2021a). Pola ekowisata berbasis masyarakat adalah pola pengembangan ekowisata yang mendukung dan memungkinkan keterlibatan penuh oleh masyarakat setempat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan usaha ekowisata dan segala keuntungan yang diperoleh (Jayawarsa, Purnami, et al., 2021a). Ekowisata berbasis masyarakat merupakan usaha ekowisata yang menitikberatkan peran aktif komunitas (Kurniawan, 2016). Hal tersebut didasarkan kepada kenyataan bahwa masyarakat memiliki pengetahuan tentang alam serta budaya yang menjadi potensi dan nilai jual sebagai daya tarik wisata, sehingga pelibatan masyarakat menjadi mutlak (Saputra, Sujana, et al., 2018).

"Pola ekowisata berbasis masyarakat mengakui hak masyarakat lokal dalam mengelola kegiatan wisata di kawasan yang mereka miliki secara adat ataupun sebagai pengelola. Ekowisata berbasis masyarakat dapat menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat setempat, dan mengurangi kemiskinan, di mana penghasilan ekowisata adalah dari jasa-jasa wisata untuk turis: fee pemandu; ongkos transportasi; homestay; menjual kerajinan, dan lain-lain. Ekowisata membawa dampak positif terhadap pelestarian lingkungan dan budaya asli setempat yang pada akhirnya diharapkan akan mampu menumbuhkan jati diri dan rasa bangga antar penduduk setempat yang tumbuh akibat peningkatan kegiatan ekowisata" (pernyataan Akademisi Universitas Warmadewa dalam sosialisasi kewirausahaan untuk desa berbasis ekowisata).

Dengan adanya pola ekowisata berbasis masyarakat bukan berarti bahwa masyarakat akan menjalankan usaha ekowisata sendiri (Bukirwa & Kising'U, 2017; Duric & Topler, 2021). Tataran implementasi ekowisata perlu dipandang sebagai bagian dari perencanaan pembangunan terpadu yang dilakukan di suatu daerah. Untuk itu, pelibatan para pihak terkait mulai dari level komunitas, masyarakat, pemerintah, dunia usaha dan organisasi non pemerintah diharapkan membangun suatu jaringan dan menjalankan suatu kemitraan yang baik sesuai peran dan keahlian masing-masing (Chathoth & Olsen, 2005; Sara et al., 2021). Ada dua aspek yang sangat terkait dan perlu dibahas secara bersamaan jika ingin mengembangkan ekowisata berbasis masyarakat sebagai satu usaha yang berhasil. Usaha harus layak secara ekonomi, menghasilkan pendapatan yang signifikan untuk masyarakat setempat, dan dikelola secara profesional. Kemudian, usaha tersebut perlu adil, bermanfaat buat masyarakat lokal sebagai mitra utama, dan mendukung konservasi secara nyata (Wong & Kwan, 2001).

Potensi Desa Galungan yang dapat Dikembangkan Menuju Desa Berbasis Ekowisata

Ekowisata yang dikembangkan di kawasan konservasi adalah ekowisata yang "hijau dan adil" untuk kepentingan pembangunan berkelanjutan dan konservasi, yaitu sebuah kegiatan usaha yang bertujuan untuk menyediakan alternatif ekonomi secara berkelanjutan bagi masyarakat di kawasan yang dilindungi, berbagi manfaat dari upaya konservasi secara layak (terutama bagi masyarakat yang lahan dan sumberdaya alamnya berada di kawasan yang dilindungi), dan berkontribusi pada konservasi dengan meningkatkan kepedulian dan dukungan terhadap perlindungan bentang lahan yang memiliki nilai biologis, ekologis dan nilai sejarah yang tinggi

(Jayawarsa, Purnami, et al., 2021a; Jayawarsa, Saputra, et al., 2021; Sara & Saputra, 2021b). Desa Galungan memiliki berbagai potensi yang dapat dikembangkan sebagai pendukung untuk menjadi desa berbasis ekowisata. Desa galungan yang pernah menjadi tuan rumah dalam acara World Mangosteen Fiesta yang mendukung dan mengembangkan terus buah manggis menjadi isyarat bahwa desa ini potensial dalam hal pertanian, perkebunan dan hasil buminya. Selain itu, Desa Galungan memiliki tanah perkebunan yang subur dengan hasil tanaman kopi, manggis dan durian, Desa Galungan menurut juga memiliki objek wisata menawan yang belum banyak diketahui wisatawan lokal maupun mancanegara, berupa air terjun alam. Salah satu tokoh masyarakat setempat menyatakan bahwa:

“Desa Galungan ini memiliki hamparan hutan desa yang luas dan menarik wisatawan. Tanaman berumur panjang tumbuh lebat di antara jalan setapak tanah. Hanya sedikit warga yang sering masuk hutan ini, tak terlihat ada jejak motor karena medan terjal, celah tebing sempit, dan cukup berliku. Sebuah air terjun dengan air jernih menjadipembasuh keringat para pelari ini. Terjunan dan debur air sangat keras, mengalir ke sejumlah jeram-jeram kecil di bawahnya. Airnya bisa langsung diminum, terutama jika di jeram teratas yang belum terkontaminasi aktivitas manusia. Di jeram-jeram bagian bawah, cocok untuk berendam atau mendinginkan kaki” (Pernyataan dari salah satu tokoh masyarakat Desa Galungan).

“Air Terjun Galungan ini petanda perjalanan menuju perkampungan setengah jalan lagi. Menuruni tebing yang membuat kaki terpeleset karena lumpur. Para pelari saling membantu, berpegangan tangan agartak tergelincir. Tali-tali kayu berguna sebagai alat bantu, sesekali ada yang terjatuh dan merosot dengan pantat. Baju dan celana bernoda lumpur. Cukup menggenjot adrenalin. Jalur tanah terjal jadi tantangan menarik, kemudian diselingi jalan landai dengan tutupan daun-daun kering tebal seperti karpet kompos. Ketika kebun durian dan kopi tersibak, petanda kawasan hutan sudah terlalui dan kini menuju persawahan lalu pemukiman” (pernyataan dari mahasiswa pencinta alam asal Universitas Warmadewa).

Di Bali tercatat ada 22 Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) dengan luas total 6852 hektar tersebar di 4 kabupaten yakni Buleleng, Jembrana, Karangasem, dan Bangli. Di antaranya Desa Pangeragoan-Jembrana (1325 ha), Desa Lemukih (988 ha), Galungan-Buleleng (712 ha), Desa Selat-Buleleng (552 ha), Tejakula-Buleleng (353 ha), Sukawana-Bangli (315 ha), Wanagiri-Buleleng (250ha), dan lainnya. Mereka mendapat hak pengelolaan seperti jasa lingkungan dan hasil hutan bukan kayu. Desa Galungan berlokasi setelah Bedugul, kawasan wisata alam dan agro di Kabupaten Tabanan. Setelah melewati Bedugul, terus ke arah Utara menuju Singaraja, ibukota Kabupaten Buleleng. Di tengah jalan berkelok membelah bukit menuju Bali Utara, ada pertigaan yang menunjukkan arah desa ini. Setelah berbelok ke arah Desa Galungan dari Jalan Raya Bedugul-Singaraja, di sepanjang perjalanan yang melewati Desa Lemukih dan Galungan terlihat kebun penuh buah dan cengkeh. Paling menonjol buah durian, membelokkan mata dari jalan penuh tikungan tajam dan terjal membelah bukit ini. Buah durian tergantung belasan sampai puluhan butir di pohonnya. Tak sedikit di pinggir jalan raya. Lalu lalang pengendara membawa tumpukan buah durian dan manggis juga terlihat. Potensi lain dari desa galungan yang mendukung ekowisata adalah masyarakatnya yang sadar akan lingkungan dan memanfaatkan keahliannya untuk berwirausaha (Chrismardani, 2016; Saputra, Sara, et al., 2019). Warga masyarakatnya ada juga yang memanfaatkan lahannya untuk ditanami tanaman obat dan hasilnya diperjualbelikan pada para pengunjung desa tersebut. Masyarakat lainnya yang memiliki keahlian dalam bidang seni menjajakan souvenir asli karya tangan mereka kepada para pengunjung. Dan masih banyak lagi model-model wirausaha yang dipilih masyarakat Desa Galungan yang berciri ekonomi kreatif. Serta yang paling menakjubkan adalah Desa Galungan sangat mendukung Peraturan Gubernur Bali tentang meminimalisis penggunaan plastik sekali pakai. Rumah-rumah di desa ini hampir keseluruhan steril dari sampah plastic sekali pakai dan para pengunjung tidak diizinkan untuk membawa atau menggunakan plastik. Ini sebagai wujud kecintaan masyarakat setempat tergadap

alam lingkungannya dan kelestarian alam menjadi kunci sukses mereka (Anggiriawan dkk., 2018; Atmadja & Saputra, 2017; Dewi dkk., 2017).

KESIMPULAN

Berdasarkan karakteristik dari kedua lembaga ekonomi tersebut (BUMDEs dan Koperasi) dimana masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Maka jika dapat disinergikan dengan menjalankan keduanya, akan memiliki daya gedor yang cukup kuat untuk mempercepat pencapaian tujuan, dan hal ini sangat memungkinkan jika melihat kembali aspek keselarasan tujuan utama dari keduanya. Untuk menghindari overlap peran dan fungsi yang bisa berdampak buruk, maka pada tahap perencanaan operasional, kedua bentuk lembaga ekonomi masyarakat ini harus melakukan pembagian peran yang jelas dan tegas. Sebagai contoh, jika BUMDES bergerak di penguatan produksi komoditi (hulu), maka koperasi bisa memperkuat sektor hilirnya, dengan melakukan diversifikasi atau hilirisasi produk. Pun halnya jika koperasi memainkan perannya di hulu, maka BUMDES akan berperan di hilir. Dengan pola seperti ini, maka diharapkan pondasi ekonomi masyarakat desa akan lebih kokoh.

Ekowisata berdampak pada berbagai aspek, beberapa di antaranya adalah aspek konservasi, pemberdayaan, dan pendidikan lingkungan. Wisata dengan fokus konservasi alam juga mampu memberikan insentif ekonomi bagi upaya pelestarian dan keanekaragaman flora fauna yang ada. Tentunya juga akan berdampak pada budaya serta warisan alam di sekitar tempat wisata tersebut. Konsep ekowisata juga bisa berguna untuk melawan kemiskinan dan mencapai pembangunan berkelanjutan. Kini semakin banyak wisatawan tertarik datang ke tempat wisata Ekowisata di Bali karena mendapatkan ketenangan dan kenyamanan. Keindahan alam Bali memang tak pernah ada habisnya untuk dieksplor. Hal ini menjadi daya tarik terbesar bagi wisatawan lokal maupun untuk berkunjung. Tidak hanya wisata pantai, ekowisata juga menjadi primadona menarik untuk dikunjungi sebagai alternatif tempat berlibur. Ekowisata merupakan sarana wisatawan untuk dapat mempelajari dan menikmati alam, hingga budaya dan sejarah setempat. Selain itu, destinasi wisata ini dapat memberikan positif terhadap budaya dan lingkungan setempat, serta meningkatkan perekonomian masyarakat.

Daftar Pustaka

- Anggiriawan, P. B., Saputra, K. A. K., & Sanjaya, I. K. P. W. (2018). Prinsip Dualitas Dan Akuntansi Sumber Daya Manusia Dalam Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 2(September), 1-14.
- Atmadja, A. T., & Saputra, K. A. K. (2017). Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 12(1), 7-16.
- Bukirwa, S., & Kising'U, M. T. (2017). Influence of Competitive Strategies on Organizational Performance of Hotels in Kenya (a Survey of Hotels in Mombasa County). *The Strategic Journal of Business and Change Management*, 4(210), 138-158.
<http://www.strategicjournals.com/index.php/journal/article/viewFile/428/458>
- Chathoth, P. K., & Olsen, M. D. (2005). Lodging industry competitive strategies: Developing a multidimensional causal empirical model to test the relationship between strategy and performance. *Tourism and Hospitality, Planning and Development*. <https://doi.org/10.1080/14790530500171674>
- Chrismardani, Y. (2016). Theory Of Planned Behavior Sebagai Prediktor Intensi Berwirausaha. *대한간호과학회지*, 28(3), 550-562. <http://www.dbpia.co.kr/Article/3031618>
- Chung, L. H., & Parker, L. D. (2008). Integrating hotel environmental strategies with management control: a structuration approach. *Business Strategy and the Environment*, 17(4), 272-286. <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/bse.546>
- Dewi, P. E. D. M., Saputra, K. A. K., & Prayudi, M. A. (2017). Optimalisasi Pemanfaatan dan Profesionalisme Pengelolaan Aset Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 2(2), 129-147.
- Duric, Z., & Topler, J. P. (2021). The role of performance and environmental sustainability indicators in hotel competitiveness. *Sustainability (Switzerland)*, 13(12). <https://doi.org/10.3390/su13126574>

- Ekayani, N. N. S., Sara, I. M., Sariyani, N. K., Jayawarsa, A. A. K., & Saputra, K. A. K. (2020). Implementation of good corporate governance and regulation of the performance of micro financial institutions in village. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, 12(7), 1-7. <https://doi.org/10.5373/JARDCS/V12I7/20201977>
- Hendrojogi. (2010). *Koperasi: Asas-asas, Teori, dan Praktik*. Rajawali Pers.
- Jaelani, A. (2016). Public Financial Management in Indonesia: Review of Islamic Public Finance. *SSRN Electronic Journal*, 72340. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2807095>
- Jayawarsa, A., K., Purnami, A. A. S., & Saputra, K. A. K. (2021a). Pentahelix To Build Sustainable Village And Tourism: A Theoretical Study. *American Research Journal of Humanities & Social Science (ARJHSS)*, 04(11), 20-27.
- Jayawarsa, A. A. K., Purnami, A. A. S., & Saputra, K. A. K. (2021b). Meaning the economic existence and financial management of the small organization of a traditional village in bali. *International Journal of Business, Economics and Law*, 24(5), 8-15.
- Jayawarsa, A. A. K., Saputra, K. A. K., & Purnami, A. A. S. (2021). Is It Important To Manage And Identify Village Wealth As A First Step To Becoming A Village Sustainability? *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, 24(6), 39-44.
- Kaihatu, T. S. (2006). Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 8(1), 1-9.
- Küçükalı, R. (2010). Teacher perception related to ideal and real situation about behaviours in teacher control form. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 2(2), 1703-1708. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2010.03.969>
- Kurniawan, P. S. (2016). Peran Adat Dan Tradisi dalam Proses Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Pakraman (Studi Kasus Desa Pakraman Buleleng, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali). In *Seminar Nasional Riset Inovatif*.
- Larasdiputra, G. D., & Saputra, K. A. K. (2021). Sosialisasi media online taniku'' sebagai pendukung bangkitnya umkm di masa pandemi covid-19 di kelurahan kesiman, denpasar, bali. *Krida Cendekia : Jurnal Pengabdian Masyarakat Sosialisasi*, 01(02), 7-14.
- Larasdiputra, G. D., & Suwitari, N. K. E. (2020). Pembinaan Pembuatan Laporan Keuangan Sederhana Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dan Pemahaman Kredit Usaha Rakyat. *JAMAICA: Jurnal Abdi Masyarakat*, 1(3), 133-139. <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JAMAICA/article/view/6891>
- Lin, G., & Yi, F. (2011). Urbanization of capital or capitalization on urban land? Land development and local public finance in urbanizing China. In *Urban Geography (Vol. 32, Issue 1)*. <https://doi.org/10.2747/0272-3638.32.1.50>
- Malesios, C., Dey, P. K., & Abdelaziz, F. Ben. (2020). Supply chain sustainability performance measurement of small and medium sized enterprises using structural equation modeling. *Annals of Operations Research*, 294(1), 623-653. <https://doi.org/10.1007/s10479-018-3080-z>
- Mulawarman, A. D. (2013). Nyanyian Metodologi Akuntansi ala Nataatmadja: Melampaui Derridian Mengembangkan Pemikiran Bangsa "Sendiri." *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 4(April). <https://doi.org/10.18202/jamal.2013.04.7189>
- Narayan, A. (2020). Does simplifying the college financial aid process matter? *Economics of Education Review*, 75(January), 101959. <https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2020.101959>
- Pakiding, R. R., & Randa, F. (2012). Rekonstruksi Penilaian Kinerja Koperasi Dengan Menggunakan Pendekatan Balanced Scorecard. *Proceeding ISBN 978-602-17013-0-0*.
- Pranita, D. (2016). Membangun Kapabilitas Dan Strategi Keberlanjutan Untuk Meningkatkan Keunggulan Bersaing Pariwisata Bahari Indonesia. *Jurnal Vokasi Indonesia*, 4(2). <https://doi.org/10.7454/jvi.v4i2.104>
- Putri, P. Y. A., & Saputra, K. A. K. (2021). Writing of scientific works in a dissertation context and the difference with thesis. *International Journal of Business, Economics and Law*, 24(4), 1-7. <https://www.ijbel.com/wp-content/uploads/2021/06/IJBEL24-701.pdf>
- Rahmat, A., Izzudin, A., & Kudir, S. (2018). Menguatkan Pembangunan Desa Berkelanjutan: Perspektif Implementasi UU Desa No. 6 Tahun 2014 di Kabupaten Bantul. *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, 2(02), 88-99. <https://doi.org/10.31326/jks.v2i02.161>
- Rasoolimanesh, S. M., Ramakrishna, S., Hall, C. M., Esfandiari, K., & Seyfi, S. (2020). A systematic scoping review of sustainable tourism indicators in relation to the sustainable development goals. *Journal of Sustainable Tourism*, 0(0), 1-21. <https://doi.org/10.1080/09669582.2020.1775621>

- Saputra, K. A. K. (2019). Case-Based Learning in Forensic Accounting Education. *International Journal for Educational and Vocational Studies*, 1(6), 545–553. <https://doi.org/10.29103/ijevs.v1i6.1763>
- Saputra, K. A. K., Anggiriawan, P. B., & Sutapa, I. N. (2018). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Perspektif Budaya Tri Hita Karana. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 3(1), 306–321.
- Saputra, K. A. K., Anggiriawan, P. B., Trisnadewi, A. A. A. E., Kawisana, P. G. W. P., & Ekajayanti, L. G. P. S. (2019). Pengelolaan Pendapatan Asli Desa Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi Pedesaan. *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 7(1), 5. <https://doi.org/10.23887/ekuitas.v7i1.16688>
- Saputra, K. A. K., Atmadja, A. T., & Koswara, M. K. (2019). Intervensi Regulasi Dan Job Relevant Information Dalam Penerapan Anggaran Koperasi. *ISEI Economic Review*, III(2), 54–59.
- Saputra, K. A. K., Sara, I. M., Jayawarsa, A. A. K., & Pratama, I. G. S. (2019). Management of Village Original Income in The Perspective of Rural Economic Development. *International Journal of Advances in Social and Economics*, 1(2), 52. <https://doi.org/10.33122/ijase.v1i2.40>
- Saputra, K. A. K., Sujana, E., & Tama, G. M. (2018). Perspektif Budaya Lokal Tri Hita Karana dalam Pencegahan Kecurangan pada Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Publik*, 1(1), 28–41.
- Saputra, K. A. K., & Tama, G. M. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Regulasi Terhadap Penerapan Anggaran Koperasi. *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma*, 16(2), 79–90.
- Sara, I. M., & Saputra, K. A. K. (2021a). Easy Access To Public Services Through Digital Village. *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences (RJOAS)*, 11(109), 109–118. <https://doi.org/10.18551/rjoas.2021-11.13>
- Sara, I. M., & Saputra, K. A. K. (2021b). Socialization of the implementation of good village governance and sustainability village credit institutions: Community service in Pejeng Village, Tampaksiring district, Gianyar Regency, Bali. *International Journal of Business, Economics and Law*, 24(4), 58–65. <https://www.ijbel.com/wp-content/uploads/2021/06/IJBEL24-726.pdf>
- Sara, I. M., Saputra, K. A. K., & Jayawarsa, A. A. K. (2019). Profesionalisme Pengelolaan Pendapatan Asli Desa Untuk Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Pedesaan. *ISEI Economic Review*, III(2), 45–53.
- Sara, I. M., Saputra, K. A. K., & Larasdiputra, G. D. (2021). Community Service Activities For Development Of (A Study Based On Community Service In Siangan Village , Gianyar). *Palarch's Journal Of Archaeology Of Egypt/Egyptology*, 18(4), 6358–6369.
- Sara, I. M., Saputra, K. A. K., & Utama, I. W. K. J. (2020). Improving Economic Development Through The Establishment Of Village- Business Enterprises. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, 12(06), 3032–3039. <https://doi.org/10.5373/JARDCS/V12I6/S20201269>
- Scott-Clayton, J., & Zafar, B. (2019). Financial aid, debt management, and socioeconomic outcomes: Post-college effects of merit-based aid. *Journal of Public Economics*, 170, 68–82. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2019.01.006>
- Sidarta, I. W. T. (2002). Dampak Perkembangan Pariwisata Terhadap Kondisi Lingkungan, Sosial dan Ekonomi Masyarakat (Denpasar-Bali) (pp. 1–145).
- Sulaeman, E. S., Murti, B., Setyawan, H., & Rinawati, S. (2017). Aplikasi Theory of Planned Behavior Pada Perilaku Pemberian ASI Eksklusif : Studi Kasus Theory of Planned Behavior Application on Exclusive Breastfeeding Behavior : A Case Study. *Jurnal Kedokteran Yarsi*, 25(2), 84–100.
- Verhees, F. J. H. M., & Meulenbergh, M. T. G. (2004). Market Orientation, Innovativeness, Product Innovation, and Performance in Small Firms. *Journal of Small Business Management*, 42(2), 134–154. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1540-627X.2004.00102.x>
- Wahyudiati, D., & Isroah. (2018). Pengaruh Aspek Keuangan Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (Sdm) Terhadap Kinerja Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkh) Di Desa Kasongan. *Jurnal Profita*, 2, 1–11.
- Widyowati, W., Syaputri, A. R., & Febrianto, D. (2018). Kebijakan Pemerintah Kota Denpasar Terhadap Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup di Kota Denpasar. *Reformasi Hukum*, 1(2), 45–50.
- Wong, K. K. F., & Kwan, C. (2001). An analysis of the competitive strategies of hotels and travel agents in Hong Kong and Singapore. *International Journal of Contemporary Hospitality Management*, 13(6), 293–303. <https://doi.org/10.1108/09596110110400490>